

FAKTOR PENYEBAB TERBENTUKNYA *STOP SOROS LAW* SEBAGAI KEBIJAKAN HUNGARIA TERKAIT MASALAH MIGRASI

Oleh :

VIRGINIA SHERIN^{1*}

NIM : E1111161012

Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP., M.Si.², Ully Nuzulian, S.IP., M.Si.²

*Email: virginiasherin@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan faktor yang menyebabkan dibentuknya kebijakan *Stop Soros Law* oleh pemerintah Hungaria. *Stop Soros Law* merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meminimalisasi arus migrasi, memperkuat basis pertahanan perbatasan, serta membatasi kegiatan yang memfasilitasi pengungsi dan pencari suaka di Hungaria. Pada tahun 2015, lebih dari satu juta pencari suaka menyeberang menuju Eropa dan menyebabkan terjadinya krisis migrasi. Hungaria menempati posisi kedua untuk permohonan suaka setelah Jerman. Hal tersebut diakibatkan oleh banyaknya pencari suaka yang melakukan perjalanan melalui negara-negara Balkan Barat terutama Serbia dan Kroasia yang berbatasan langsung dengan perbatasan selatan Hungaria. Pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, serta teori *decision-making* menurut William D. Coplin digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis fenomena terkait. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang menyebabkan terbentuknya kebijakan *Stop Soros Law* di Hungaria. (1) Dalam lingkup politik domestik, adanya transisi politik, dukungan masyarakat melalui konsultasi nasional, serta adanya *Non Governmental Organization* yang bergerak untuk mendukung migrasi. (2) Faktor ekonomi dan militer disebabkan oleh besarnya anggaran yang diperuntukkan bagi migran, serta kekuatan militer Hungaria yang berada di posisi menengah ke bawah. (3) Dalam konteks internasional, Uni Eropa terus menyuarkan skema relokasi migran yang dinilai memberatkan Hungaria.

Kata Kunci: Hungaria, *Stop Soros Law*, Migran

A. PENDAHULUAN

Sejak abad ke-20, isu migrasi telah menjadi fokus perhatian dunia internasional. Di Benua Eropa khususnya, peningkatan arus migrasi yang masuk terhitung pada tahun 2015, telah menunjukkan tingkat

krisis yang tentunya memberikan dampak pada sektor keamanan maupun ekonomi negara-negara di Eropa (Kynsilehto 2018, 181). Arus migrasi yang masuk ke Eropa pada tahun 2015 tersebut mayoritas dilakukan secara ilegal oleh warga

negara dunia ketiga. Migrasi ilegal sendiri dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh migran untuk masuk, tinggal, bahkan bekerja di negara lain tanpa izin atau dokumen yang sesuai dengan peraturan kemigrasian negara tujuan (*European Commission*, 2021).

Sebanyak lebih dari 1,3 juta klaim suaka diajukan di Eropa (*BBC News International*, 2016). Adanya kewajiban bagi anggota Uni Eropa untuk menerima pengungsi dan pencari suaka, membuat beberapa negara merasa keberatan. Tak terkecuali Inggris, yang mengadakan referendum pada 23 Juni 2016 untuk memutuskan status keanggotaannya dalam Uni Eropa. Sebanyak lima puluh dua persen masyarakat Inggris menyetujui wacana *British Exit* (Brexit) karena mereka merasa bahwa Inggris telah mendapat masalah yang cukup substansial terkait migrasi (Alunaza dan Sherin 2018, 159).

Hungaria juga memiliki pandangan yang sama dengan Inggris terkait masalah migrasi. Peralnya, Hungaria menjadi pintu masuk bagi pengungsi dan pencari suaka yang

ingin memasuki kawasan Eropa dengan mayoritas berasal dari Suriah, Afghanistan, dan Irak. Akibatnya, pada tahun 2015 Hungaria membangun pagar di kawasan perbatasan selatan, yang membatasi negaranya dengan Serbia dan Kroasia, untuk menangani lonjakan migrasi pencari suaka tanpa dokumen atau ilegal hingga mencapai 171.000 orang (*BBC News International*, 2018). Meskipun telah dibangun pagar perbatasan, aktivitas migrasi ilegal yang masuk ke Hungaria masih terjadi. Hingga tahun 2017, otoritas Hungaria setidaknya menangkap pencari suaka yang memasuki negaranya secara ilegal mencapai 3 ribu orang per hari (Bensman, 2019).

Di sisi lain, Uni Eropa terus menyuarakan kebijakannya terkait pemberian bantuan kepada warga negara dunia ketiga yang membutuhkan perlindungan internasional di salah satu negara anggotanya (*Home Affairs of European Commission*, 2014). Kegiatan solidaritas dalam bidang HAM lainnya yang ditujukan bagi migran, terutama para pencari suaka

juga dilakukan oleh berbagai organisasi non-pemerintah dan kelompok informal lainnya (Kynsilehto 2018, 182).

Salah satu organisasi non-pemerintah di Hungaria yang bergerak dalam bidang HAM untuk membantu para pencari suaka adalah *Open Society Foundation* yang didirikan oleh filantropis George Soros. Organisasi tersebut berpandangan bahwa dengan adanya bantuan yang diperuntukkan bagi para migran, yang dalam hal ini pengungsi dan pencari suaka, akan membantu meningkatkan kualitas hidup bagi jutaan orang di seluruh dunia. Oleh sebab itu, *Open Society Foundation* juga mendukung pengungsi dan pencari suaka yang berada maupun yang ingin memasuki kawasan Eropa (*The Wall Street Journal*, 2016). Kinerja *Open Society Foundation* tentunya bertentangan dengan pandangan pemerintah Hungaria yang justru menolak kehadiran migran, terutama pencari suaka tanpa dokumen atau ilegal.

Ketidakpuasan Hungaria terhadap kebijakan Uni Eropa terkait pengungsi dan pencari suaka, serta

organisasi non-pemerintah, khususnya *Open Society Foundation* merupakan katalisator yang menyebabkan pemerintah Hungaria mengeluarkan kebijakan yang disebut *Stop Soros Law*. *Stop Soros Law* adalah peraturan yang diinisiasi oleh pemerintah Hungaria pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Viktor Orbán pada tahun 2018. *Stop Soros Law* merupakan respon dari pemerintah Hungaria akibat tingginya arus migrasi ke negara tersebut yang telah terjadi sejak tahun 2014. Terdapat ketentuan umum yang tertulis dalam paket kebijakan *Stop Soros Law* yang menjelaskan bahwasannya Hungaria menilai kegiatan yang dapat mengancam ketertiban publik, seperti memasuki wilayah negaranya tanpa izin, menyalahgunakan prosedur suaka, serta membantu memfasilitasi migrasi para pencari suaka yang tidak memiliki dokumen merupakan tindakan kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana (Pintér 2018, 10).

Kemudian dalam Pasal 11 *Stop Soros Law*, tertulis bahwa sanksi

pidana akan diberikan kepada (Pintér 2018, 6):

- 1a) Orang atau organisasi yang memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada orang yang tidak mengalami penganiayaan atau kekerasan di negara asalnya agar aplikasi suakanya diterima atau memfasilitasi migrasi ilegal.
- 1b) Orang yang memasuki Hungaria secara ilegal dan/atau mendapatkan izin tinggal secara ilegal, menghalangi atau merusak pembatas perbatasan.
- 2) Orang atau organisasi yang membantu pendanaan terhadap kegiatan di atas.

Sebagai langkah untuk menangani migrasi ilegal, pemerintah Hungaria melakukan amandemen terhadap Undang-Undang (UU) No. 80 Tahun 2007 tentang Suaka Pasal 51 Ayat (2) yang berbunyi (*National Assembly 2007*, 9):

“Permohonan suaka tidak dapat diterima apabila: (a) pemohon merupakan warga negara anggota Uni Eropa, (b) pemohon telah diakui oleh salah satu

negara anggota Uni Eropa sebagai pengungsi, (c) pemohon telah diakui oleh negara lainnya sebagai pengungsi, (d) pengajuan aplikasi ulang setelah penolakan suaka atas dasar faktual yang sama, dan (e) pemohon merupakan warga negara dunia ketiga yang aman”.

Stop Soros Law menambahkan poin dalam Ayat (2) tersebut yakni “(f) permohonan suaka tidak dapat diterima apabila sebelum memasuki Hungaria, pemohon tiba melalui negara di mana mereka tidak menjadi sasaran penganiayaan atau bahaya serius yang dapat mengancam hidupnya” (Pintér 2018, 4).

Lebih lanjut, parlemen juga mengesahkan amandemen konstitusi dalam *Stop Soros Law* mencakup kebijakan terkait pemantauan perbatasan eksternal Hungaria oleh Badan Kepolisian Hungaria, sehingga tugas dari badan kepolisiannya termasuk memperkuat penjagaan perbatasan negara, mencegah, mendeteksi, dan menggagalkan aktivitas penyeberangan perbatasan negara yang melanggar aturan hukum (Pintér 2018, 2).

Berdasarkan pernyataan di atas, pemerintah Hungaria dapat dilihat sebagai suatu negara yang menganggap bahwa migrasi merupakan suatu masalah yang memerlukan penanganan secara optimal. Oleh sebab itu, terbentuk kebijakan *Stop Soros Law* yang secara nyata bertujuan untuk meminimalisasi arus migrasi, terutama migrasi ilegal yang dilakukan oleh pencari suaka. Melihat fenomena tersebut, penelitian ini berfokus pada faktor penyebab terbentuknya kebijakan *Stop Soros Law* oleh pemerintah Hungaria pada tahun 2018. Dengan diterapkannya kebijakan *Stop Soros Law* di Hungaria pada masa pemerintahan Perdana Menteri Viktor Orbán periode ketiga, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yakni apa faktor penyebab dibentuknya *Stop Soros Law* oleh pemerintah Hungaria pada tahun 2018?

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori *Decision-Making* Menurut William D. Coplin

Kebijakan luar negeri merupakan salah satu upaya suatu negara untuk mencapai

kepentingannya. Menurut William D. Coplin, terdapat setidaknya tiga faktor penentu yang mempengaruhi kepala negara yang mewakili pemerintahannya dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Tiga faktor tersebut yakni situasi politik domestik, ekonomi dan militer, serta konteks internasional (Coplin 2003, 30). *Pertama*, politik domestik. Menurut Coplin, kebijakan luar negeri merupakan representasi dari situasi politik domestik suatu negara. Artinya, kebijakan luar negeri yang dirumuskan oleh pembuat keputusan merupakan dampak yang dihasilkan oleh sistem politik negaranya. Politik domestik mencakup elemen budaya yang di dalamnya terkandung perilaku masyarakat serta kondisi nyata dari situasi politik yang sedang terjadi. Para pembuat keputusan akan bertindak mewakili negaranya dalam proses perumusan kebijakan luar negeri dengan mempertimbangkan kepentingan nasionalnya (Coplin 2003, 75-76).

Terdapat empat jenis *policy influencers* atau aktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan menurut Coplin (2003, 82-83), yakni

bureaucratic influencer, *partisan influencer*, *interest influencer*, dan *mass influencer*. Penelitian ini menekankan pada pengaruh dari *bureaucratic influencer* yang merujuk kepada orang atau organisasi yang terdapat di dalam lingkup eksklusif pemerintah, yang memiliki fungsi untuk membantu pengambil keputusan dalam menyusun hingga melaksanakan kebijakan luar negerinya.

Selain politik domestiknya, pengambil keputusan harus memperhitungkan kondisi ekonomi dan militer yang dimiliki oleh negaranya. Di dalam bukunya, Coplin (2003) menyatakan bahwa kondisi ekonomi suatu negara memainkan peranan penting dalam kebijakan luar negerinya. Kondisi ekonomi yang dimaksud adalah mencakup kesejahteraan negara, pertumbuhan ekonomi, dan bagaimana negara dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya. Selanjutnya, kondisi dalam bidang militer yakni kemampuan pertahanan dan keamanan yang dimiliki oleh negara (Coplin 2003, 110- 130).

Sementara itu, konteks internasional adalah sesuatu yang terjadi di luar negeri dan di luar kendali negara. Konteks internasional merupakan hasil dari kebijakan luar negeri seluruh negara di masa lalu, saat ini, maupun tindakan untuk mengantisipasi hal yang tak terduga terjadi di masa depan. Menurut Coplin (2003, 165), sifat yang dimiliki oleh sistem internasional serta sikap suatu negara di lingkup eksternal dapat menentukan bagaimana negara tersebut berperilaku atau bereaksi terhadap masalah-masalah internasional.

C. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Mayer dan Greenwood dalam Silalahi (2012, 27), penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan proses, kasus, peristiwa, maupun tindakan individu atau kelompok. Sementara itu, untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis

melakukan penelusuran melalui media cetak maupun daring.

Proses keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Sementara itu, mengacu pada model analisis ala Miles dan Huberman, teknik analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa langkah penting, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono 2015, 99).

D. PEMBAHASAN

1. Politik Domestik

Pada April 2010, Partai Fidesz berhasil mengalahkan Partai Sosialis Hungaria (MSZP) dan memenangkan pemilihan umum dengan suara lebih dari dua pertiga kursi parlemen. Hal tersebut menjadikan Fidesz sebagai partai terbesar di parlemen dan menggandeng Partai Rakyat Demokratik Kristen (KDNP) sebagai mitra koalisi. Pada tahun 2014, kemenangan kembali diraih oleh Partai Fidesz dan koalisinya, dengan Viktor Orbán sebagai perdana menterinya (Murray 2014, 87). Setelah pemilihan umum tahun 2010, telah banyak lembaga-lembaga dibentuk untuk mendukung

supremasi hukum, demokrasi, dan pasar bebas. Namun, ketika tahun 2014, pemerintah Hungaria mulai melakukan transisi politik yang ditandai dengan perubahan haluan politiknya yang semula liberal menjadi negara yang menentang liberalisme. Ketika arus migrasi mulai berdatangan ke Eropa, *xenophobia* telah menjadi ciri utama politik domestik Hungaria. Sejak tahun 2015, Fidesz mendominasi bidang politik dengan wacana anti-migrasi (Krekó 2017, 2). Sehingga, pemerintah Hungaria dikenal sebagai pemerintah konservatif sayap-kanan.

Kelompok sayap kanan atau konservatif adalah kelompok yang menjunjung ideologi nasionalis, religius, dan kurang liberal. Pada tataran politik, kelompok ini cenderung membatasi kebebasan media swasta dan aktivitas NGO atau asosiasi sipil domestik (Merkel dan Scholl 2018, 38). Kehadiran Fidesz dan koalisi bersama Viktor Orbán yang merupakan kelompok konservatif-sayap kanan tersebut mengisyaratkan adanya perubahan politik yang cukup besar di dalam pemerintahan Hungaria. Pada

periode setelah 2014 di bawah kepemimpinan Orbán, Hungaria tidak lagi mendukung liberalisme (Lendvai, 2016). Migrasi adalah suatu rival bagi pemerintahan ini. Hal tersebut dikarenakan ideologi konservatif sayap kanan yang cenderung tertutup terhadap orang asing, terutama para migran yang datang dari negara-negara dunia ketiga. Pada tahun 2014, pemerintah sendiri mengumumkan bahwa Hungaria memiliki sistem demokrasi iliberal. Ideologi iliberal tersebut menjadikan negara Hungaria tidak lagi memberikan kebebasan penuh bagi seluruh entitas yang berada di dalam wilayah kedaulatannya. Meskipun demikian, pemerintah Hungaria tetap menjadikan kepentingan nasional selalu terjamin, terutama terkait keamanan dan kesejahteraan masyarakat Hungaria itu sendiri (Enyedi 2016, 9).

Di dalam lingkup politik domestik, peran dari *policy influencer* menjadi kunci utama dalam terbentuknya suatu kebijakan. Fidesz yang menguasai kursi parlemen menjadi lebih mudah untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan

pemerintah, sehingga dapat dikatakan bahwa Fidesz dan koalisinya menjadi *bureaucratic influencer* di lingkup pemerintahan Hungaria. Pandangan konservatif sayap kanan yang dijunjung oleh pemerintahan Fidesz dengan Viktor Orbán sebagai perdana menternya, mengakibatkan sejumlah aturan restriktif mulai diterapkan. Pada musim semi tahun 2015, pemerintah Hungaria memasang ratusan *billboards* atau papan reklame di berbagai penjuru negaranya. Kalimat dalam papan reklame ditulis dengan bahasa Hungaria yang berbunyi “Jika Anda Datang ke Hungaria, Anda Harus Menghormati Budaya Kami” dan “Jika Anda Datang ke Hungaria, Anda Harus Mematuhi Hukum Kami” (Index.hu, 2015).

Bersamaan dengan pemasangan sejumlah papan reklame tersebut, pemerintah Hungaria juga meluncurkan survei yang disebut sebagai konsultasi nasional. Survei atau konsultasi nasional yang berfokus pada migrasi dan ancaman (terorisme) dimulai dari 24 April dan berakhir pada 27 Juli 2015. Pertanyaan yang diajukan di

antaranya berkaitan dengan persepsi publik mengenai relevansi antara migrasi dan ancaman terorisme yang telah meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Bocskor 2018, 562). Sebanyak 1 juta kuesioner yang dikembalikan kepada pemerintah. Menurut data yang dipublikasikan oleh pemerintah Hungaria, hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak lebih dari 2/3 responden setuju dengan pendapat pemerintah (Oross dan Pocza 2019, 4). Hal tersebut tidak terlepas dari pandangan *xenophobia* di Hungaria yang telah mencapai rekor tertinggi yakni sebesar 46 persen dari total populasi pada April 2015 (Bocskor 2018, 558).

Pada April 2017, dilaksanakan kembali konsultasi nasional. Secara umum, pertanyaan yang dituliskan di dalam kuesioner itu berkenaan dengan pandangan pemerintah Hungaria terkait campur tangan asing dalam urusan nasional Hungaria. Kuesioner yang berakhir hingga 20 Mei 2017 tersebut diisi oleh 1,7 juta penduduk Hungaria dengan mayoritas jawaban (98%) yang setuju dengan pemerintah untuk melindungi urusan domestik dari

campur tangan asing (Oross dan Pocza 2019, 4).

Pada Oktober 2017, pemerintah mengirimkan kuesioner yang berjudul “*National Consultation about the Soros Plan*”. Konsultasi nasional tersebut diadakan untuk menyikapi pernyataan George Soros bahwa Uni Eropa harus menerima setidaknya satu juta pencari suaka setiap tahun untuk masa mendatang, dan hal tersebut harus menjadi fitur permanen dan wajib dari sistem suaka Uni Eropa (Novak, 2017). Responden dari kuesioner Oktober 2017 ini berhasil menarik responden sebanyak 2,3 juta orang dengan mayoritas suara yang mendukung pemerintah untuk tidak menyetujui wacana Soros (Oross dan Pocza 2019, 4).

Pandangan kontra terhadap organisasi non-pemerintah terus berlanjut. Pemerintah Hungaria di bawah kepemimpinan Viktor Orbán mengeluarkan kebijakan pembatasan ruang gerak NGO di negaranya. Secara khusus, pemerintah memiliki pandangan kontra terhadap NGO yang didirikan dan didanai oleh

George Soros. Pemerintah menilai bahwa organisasi yang bergerak di negaranya tersebut memberikan dampak yang negatif bagi keamanan dan identitas nasional Hungaria. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Hungaria dalam *Venice Commission* (2017, 9), yang berpendapat bahwa kepentingan asing dapat lebih mudah masuk ke negaranya apabila terdapat wadah, yang dalam hal ini adalah NGO, yang menerima bantuan dana dari pihak asing. Apabila kebebasan berorganisasi tanpa campur tangan pemerintah terus dilakukan, maka pihak asing akan menggunakan NGO sebagai sarana pencapaian tujuannya, sedangkan tujuan bagi kehidupan sosial dan politik Hungaria terabaikan. Dengan kata lain, pemerintah Hungaria mengkhawatirkan keberadaan NGO di negaranya menjadi perpanjangan tangan dari pemodal asing untuk melancarkan serangkaian tujuan tertentu, yang dalam hal ini adalah membantu para migran. Pemerintah berpendapat bahwa proses ini dapat menimbulkan risiko tinggi bagi keamanan dan kedaulatan nasional Hungaria.

Mayoritas NGO di Hungaria yang menerima pendanaan dari George Soros memang bergerak untuk melindungi dan mendukung kaum minoritas, seperti komunitas migran, pengungsi, dan pencari suaka. Oleh karena itu, pemerintah secara jelas mengatakan bahwa NGO tersebut mendukung dan membantu pergerakan migrasi ke Hungaria. Pemerintah menilai dukungan dan bantuan yang diberikan oleh NGO menyebabkan migrasi ke negaranya akan terus terjadi (Miniszterelnok.hu, 2018).

Sebelumnya, yakni pada Januari 2018, pemerintah Hungaria bahkan telah memasang ratusan *billboards* atau papan reklame di berbagai penjuru wilayahnya terkait ketidaksetujuan mereka terhadap George Soros dan organisasinya yang mendukung migrasi di dan/atau yang akan datang ke Hungaria. Reklame yang dimaksud antara lain bertuliskan “Soros Membawa Jutaan Orang dari Afrika dan Timur Tengah, Stop Soros!” (Sarnyai, 2018). Pemerintah Hungaria menjadikan isu migrasi sebagai ancaman, dan kehadiran organisasi George Soros di

negaranya dinilai justru menyebabkan lebih banyak migran datang ke Hungaria.

2. Ekonomi dan Militer (Keamanan)

Di Hungaria, terdapat otoritas bernama *National Directorate-General for Aliens Policing* yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan atau peninjauan terhadap pencari suaka yang akan menerima bantuan dan dukungan sesuai dengan aturan Kondisi Penerimaan Uni Eropa (*National Directorate-General for Aliens Policing*, 2019).

Besarnya arus migrasi ke Hungaria mengharuskan pemerintah mengeluarkan anggaran yang besar pula, terutama terkait biaya akomodasi yang diperuntukkan bagi pencari suaka yang ditampung sementara di kamp perbatasan selatan, tepatnya di Röszke dan Tompa. Selain itu, terdapat pula kekhawatiran pemerintah Hungaria mengenai motif dari pencari suaka. Pemerintah mengkhawatirkan pencari suaka datang sebagai migran ekonomi yang meninggalkan negara

asalnya berdasarkan alasan ekonomi (Bocskor 2018, 558).

Pemerintah Hungaria dihadapi oleh arus migrasi yang masif dari perbatasan selatannya sehingga mengakibatkan pemerintah Hungaria harus mengeluarkan biaya sejumlah 293 miliar Euro pada akhir tahun 2016 berkaitan dengan penanganan migrasi di negaranya (Cosgrave dkk. 2016, 42-46). Selain itu, pagar kawat di kawasan perbatasan Hungaria-Kroasia khususnya, telah menelan biaya hingga ratusan juta dolar juga masih belum optimal dalam mengurangi migrasi ilegal. Pencari suaka berdatangan mengajukan aplikasi di Hungaria alih-alih mendaftarkan diri di negara aman pertama yang mereka masuki, bahkan mayoritas dilakukan dengan cara yang ilegal dengan menggunakan jasa penyelundup melalui jalur tidak resmi (Bensman, 2019).

Dalam bidang militer atau keamanan, Hungaria memiliki Pasukan Pertahanan Hungaria. Pasukan Pertahanan Hungaria adalah penjamin utama kedaulatan dan integritas teritorialnya, dan karena itu

memainkan peran yang signifikan dalam melindungi keamanan dari segala ancaman dari luar (*Ministry of Defence* 2012, 17). Hungaria memiliki pasukan pertahanan aktif berjumlah sebanyak 25 ribu orang untuk angkatan darat dan udara. Kapabilitas militer Hungaria tidak pernah berada di posisi 25 negara dengan kemampuan militer terkuat di dunia hingga saat ini. Hungaria selalu berada di posisi di bawah 50 besar dari 138 negara di dunia. Hungaria berada di kawasan perbatasan eksternal Uni Eropa, sehingga dibutuhkan kapabilitas militer yang mumpuni (globalfirepower.com, 2015).

Pada tahun 2015, arus migrasi yang memasuki kawasan Eropa mencapai puncaknya. Meskipun Jerman menjadi negara yang menampung pencari suaka terbanyak, Hungaria memiliki proporsi tertinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya, yakni 1,8 ribu pencari suaka berbanding 100 ribu penduduk lokal Hungaria pada 2015 (*BBC News International*, 2016). Selain terkait proporsi perbandingan pencari suaka dengan penduduk lokalnya,

Hungaria juga mengantisipasi tindak kejahatan yang mungkin terjadi ketika arus migrasi secara masif masuk ke negaranya akibat mobilitas yang tidak terkontrol. Dari Mei 2014 hingga Mei 2018, Uni Eropa telah menghadapi puluhan bahkan ratusan serangan yang dilakukan oleh kelompok jaringan maupun tunggal. Sebagian besar dari serangan-serangan tersebut terjadi di Perancis, Inggris, Jerman, dan Italia. Senjata yang digunakan dalam serangan umumnya berupa bahan peledak, senjata tajam, dan serangan dengan menggunakan kendaraan. Mayoritas penyerangan dilakukan di lokasi-lokasi strategis, seperti stasiun metro, bandara internasional, atau lokasi kerumunan lainnya (Europol 2018, 5).

Menurut laporan dari Europol (2017, 6), pelaku serangan yang terjadi di lingkup Uni Eropa adalah orang asing, yang beberapa di antaranya telah lama tinggal di kawasan tersebut. Serangan yang telah terjadi di negara-negara besar menjadi faktor pemerintah Hungaria dalam menerapkan kebijakan domestik negaranya. Meskipun

Perancis, Inggris, Jerman, dan Italia merupakan negara-negara yang menempati posisi 15 besar dalam kekuatan alutsistanya, negara-negara tersebut bahkan telah mendapatkan ancaman yang membahayakan keamanan nasionalnya. Europol menyatakan bahwa arus migrasi ke Eropa dari negara-negara konflik diperkirakan akan terus berlanjut (Europol 2017, 6). Dengan kapabilitas militer Hungaria yang jauh di bawah negara-negara besar di Uni Eropa, serta sebagai negara yang memiliki perbatasan eksternal, Hungaria juga memiliki kemungkinan untuk mendapatkan ancaman dari pihak asing. Viktor Orbán menanggapi serangan-serangan yang terjadi di Eropa dengan menyatakan bahwa *“Serangan telah berulang kali terjadi di Eropa dan pemerintah negara anggota Uni Eropa harus mengambil tindakan untuk memulihkan keamanan Eropa”* (Miniszterelnok.hu, 2017).

Untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang mungkin terjadi, pemerintah Hungaria akan berupaya untuk mengambil langkah-

langkah yang dinilai tepat. Presiden Áder menyatakan bahwa Hungaria siap untuk mengambil bagian dalam upaya bersama untuk lebih memperkuat keamanan negara dan masyarakatnya (Miniszterelnok.hu 2017). Pada Januari 2018, pemerintah Hungaria kemudian mengalokasikan dana senilai HUF 100 miliar atau 324 juta Euro untuk meningkatkan jumlah barak di kawasan perbatasan, dan alutsistanya. Pemerintah Hungaria bahkan berkomitmen akan meningkatkan anggaran pertahanan setiap tahunnya (About Hungary, 2018). Dengan *military power* yang berada di bawah negara-negara tersebut, menyebabkan pemerintah mengantisipasi terjadinya serangan serupa di negaranya. Penulis melihat bahwa hal ini menjadi salah satu pemicu pemerintah Hungaria bersikap tertutup terhadap migran dari negara dunia ketiga karena pemerintah berusaha melindungi keamanan nasionalnya dari ancaman asing.

Pemerintah Hungaria juga mengerahkan relawan sipil terlatih untuk membantu Pasukan Pertahanan

Hungaria dalam menjaga kawasan perbatasan (Kovács, 2016). Kehadiran *Stop Soros Law* kemudian juga memberikan legitimasi kepada Badan Kepolisian Hungaria untuk turut serta dalam operasi di kawasan perbatasan akibat masih tingginya jumlah migrasi ilegal yang memasuki Hungaria meskipun telah dibangun pagar perbatasan. Sehingga, diharapkan Pasukan Pertahanan, Badan Kepolisian, serta relawan sipil dapat memperkuat basis pertahanan di kawasan perbatasan.

3. Konteks Internasional

Sejak tahun 1999, Uni Eropa telah membentuk *Common European Asylum System* (CEAS). CEAS sendiri merupakan sistem yang diterapkan oleh Uni Eropa untuk menangani masalah suaka. Sistem suaka yang disebut CEAS ini bersifat *conditional* atau mengikuti keadaan yang sedang terjadi. Oleh sebab itu, kerangka kerja sistem ini sering diperbarui (*Home Affairs of European Commission* 2014, 3). Untuk membantu menangani tekanan arus migrasi sejak akhir tahun 2014, Uni Eropa mengambil langkah terutama terkait kedatangan migran

dari Laut Mediterania yang membutuhkan respon cepat. Untuk itu, pada 27 Mei 2015, *European Commission* kemudian mengajukan proposal yang berisi langkah-langkah yang perlu diterapkan ketika menghadapi kondisi darurat. Berdasarkan Traktat Lisbon Pasal 78 Ayat (3), pengajuan proposal dilakukan oleh *European Commission* karena terdapat situasi darurat yang ditandai dengan masuknya orang dari negara ketiga secara tiba-tiba di beberapa titik dalam jumlah besar (*Foreign and Commonwealth Office London* 2008, 66). Proposal tersebut berisi skema relokasi migran yang membutuhkan perlindungan internasional di negara-negara anggota Uni Eropa. Negara penerima akan bertanggung jawab terhadap pemantauan aplikasi suaka serta menjamin kehidupan mereka (*European Commission* 2015a, 3-4).

Pada Juli 2015, *Justice and Home Affairs Council* menyetujui langkah-langkah yang diusulkan oleh *European Commission* mengenai relokasi migran yang membutuhkan perlindungan internasional dari

Yunani dan Italia (*European Commission* 2015b).

Sementara itu, *Visegrád Group* atau *Visegrád Four* (V4) yang terdiri dari negara-negara Eropa Tengah, yakni Republik Ceko, Hungaria, Polandia, dan Slovakia melihat bahwa agenda tersebut tidak lagi mengenai keterlibatan secara sukarela dalam krisis migrasi, melainkan upaya untuk melibatkan semua negara anggota dengan wajib ke dalam mekanisme relokasi. Negara-negara V4, khususnya Hungaria melihat bahwa sistem kuota yang diusulkan oleh Uni Eropa merupakan hal yang membahayakan keamanan nasional negaranya akibat jumlah pencari suaka yang terlalu banyak sehingga manajemen migrasi akan sulit dilaksanakan secara optimal (Bauerova, 2018). Sikap penolakan Hungaria terlihat secara jelas melalui adanya penutupan perbatasan eksternal, serta tidak menerima kuota relokasi migran dari Yunani dan Italia.

Selain itu, merujuk pada Regulasi Dublin, pencari suaka harus mengajukan klaim suaka di negara aman pertama yang mereka masuki.

Berdasarkan Regulasi Dublin No. 604/2013, ditetapkan bahwa negara-negara Uni Eropa wajib mengizinkan akses untuk permohonan suaka di negaranya. Di dalam regulasi tersebut pula dijelaskan bahwa pencari suaka harus mencari suaka di negara aman pertama yang dapat mereka jangkau. Artinya, apabila pencari suaka telah melewati negara lainnya yang dianggap aman, maka negara anggota Uni Eropa berhak untuk menolak permohonan suaka yang diajukan. Hal ini bertujuan untuk mencegah para pencari suaka untuk berpindah antarnegara dengan maksud untuk mencari rezim perlindungan yang paling menarik terutama dari segi ekonomi (*UK Home Office* 2020, 6). Dalam hal ini, Yunani dan Italia merupakan negara aman sehingga negara anggota Uni Eropa lainnya tidak wajib untuk menerima klaim dari pencari suaka yang telah melewati kedua negara tersebut (Mészáros 2019, 246).

Meskipun tidak merasakan dampak yang signifikan layaknya Hungaria, ketiga negara lainnya menunjukkan sikap solidaritas antarsesama anggota V4 dengan turut

menolak sistem kuota. Hal ini menunjukkan bahwa V4 bertindak sebagai unit yang mempertahankan sudut pandang bersama yang mewakili kepentingan bersama negara-negara anggotanya (Bauerova 2018, 101). Pada 4 September 2015, V4 merilis *joint statement* yang menyatakan bahwa negara anggota V4 secara penuh mendukung Hungaria dalam mengatasi tantangan akibat arus migrasi (*International Visegrád Fund*, 2015). Dalam pertemuan luar biasa para menteri dalam negeri Uni Eropa pada 14 September 2015, semua menteri yang mewakili V4 menolak sistem yang disarankan oleh Uni Eropa untuk menerima skema relokasi migran ke seluruh negara Uni Eropa (Bauerova 2018, 101).

Berbagai forum diskusi di tingkat Uni Eropa dilangsungkan untuk mencapai kesepakatan mengenai skema relokasi pengungsi dan pencari suaka dari Yunani dan Italia hingga akhir tahun 2016. Namun, negara V4 masih memiliki pandangan kontra terhadap skema relokasi yang diusulkan oleh Uni Eropa. Sikap penolakan terhadap

kuota wajib juga terus berlanjut hingga tahun 2017 dibuktikan dari adanya statistik yang menunjukkan bahwa hanya 12 migran datang ke Republik Ceko dan 16 migran datang ke Slovakia dari Yunani dan Italia, sedangkan tidak terdapat migran dari Yunani dan Italia yang datang ke Polandia dan Hungaria (Bauerova 2018, 105).

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Terbentuknya kebijakan *Stop Soros Law* didorong oleh beberapa faktor. *Pertama*, dalam lingkup politik domestiknya, meskipun berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah Hungaria untuk menangani masalah migrasi terbilang restriktif akibat sistem iliberal yang dianutnya, pemerintah memiliki satu tujuan utama yakni melindungi keamanan dan kepentingan nasionalnya. *Kedua*, pemerintah telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menangani migrasi, baik untuk mengakomodasi pengungsi dan pencari suaka, membangun pagar perbatasan, hingga meningkatkan kekuatan alutsista militernya. *Ketiga*, adanya

kebijakan relokasi migran yang ditetapkan oleh Uni Eropa berdasarkan kerangka kerja CEAS, dinilai memberatkan pemerintah Hungaria.

2. Saran

Pertama, pemerintah Hungaria diharapkan dapat lebih terbuka dalam menangani masalah migrasi di negaranya, karena berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. *Kedua*, pemerintah Hungaria sebaiknya dapat memandang kehadiran NGO sebagai mitra dalam menangani masalah migrasi karena dapat membantu pemerintah dalam menyediakan akomodasi bagi pencari suaka. *Ketiga*, sebagai bagian dari Uni Eropa, Hungaria diharapkan dapat lebih berkontribusi dalam menangani masalah migrasi karena masalah tersebut membutuhkan komitmen dan solidaritas bersama.

F. REFERENSI

Buku

- Coplin, William D. (2003). *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoretis*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo.
- Home Affairs of European Commission. (2014). *A Common European Asylum*

System. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Kynsilehto, Anitta. (2018). *Critical Perspective on Migration in the Twenty-First Century*. Bristol: E-International Relations Publishing.

Lendvai, Paul. (2016). *Orbán: Hungary's Strongman*. New York: Oxford University Press.

Murray, Lorraine. (2014). *Bulgaria, Hungary, Romania, the Czech Republic, and Slovakia*. New York: Britannica Educational Publishing.

Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

UK Home Office. (2020). *Dublin III Regulation*. London: Home Office.

Jurnal

Alunaza, Hardi dan Virginia Sherin. (2018). *Pengaruh British Exit (BREXIT) terhadap Kebijakan Pemerintah Inggris terkait Masalah Imigran*. *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol. 2, No. 2.

Bauerová, Helena. (2018). *Migration Policy of the V4 in the Context of Migration Crisis*. Diambil dari <https://doi.org/10.2478/pce-2018-0011>.

Bocskor, Akos. (2018). *Anti-Immigration Discourses in Hungary during the 'Crisis' Year: The Orbán Government's 'National Consultation' Campaign of*

2015. *Sociology*, Vol. 52, No. 3.
- Enyedi, Zsolt. (2016) *Paternalist Populism and Illiberal Elitism in Central Europe*. *Journal of Political Ideologies*, Vol. 21, No. 1.
- Krekó, Péter. (2017). *Rethinking the Far Right in Hungary: Defeating Orbán is Impossible without Jobbik's Votes*. Perspective. Budapest: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Merkel, Wolfgang dan Felix Scholl. (2018). *Illiberalism, Populism and Democracy in East and West*. *Czech Journal of Political Science*, Vol. 25.
- Mészáros, Edina Lilla . (2019). *The Politicization, Mediatization and the Visual Framing of the Refugee Crisis in Hungary*. Diambil dari http://refeu.eu/wp-content/uploads/2019/09/034_II_16_Meszaros.pdf.
- Oross, Daniel dan Kálmán Pócsa. (2019). *Constitutional Changes in Hungary and the National Consultation as a Deliberative Practice*. ECPR 2019 Joint Sessions of Workshop in Belgium.
- Artikel Online**
- About Hungary. (2018). *Hungary Allocates 100 Billion HUF to Improve Military Capabilities*. Diambil dari <http://abouthungary.hu/news-in-brief/hungary-allocates-100-billion-huf-to-improve-military-capabilities/>.
- BBC News International. (2016). *Migrant Crisis: Migration to Europe Explained in Seven Charts*. British Broadcasting Corporation. BBC News Company. Diambil dari <https://www.bbc.com/news/world-europe-34131911>.
- _____. (2018). *Hungary Passes 'Stop Soros Law' Law Banning Help for Migrants.* British Broadcasting Corporation. BBC News Company. Diambil dari <https://www.bbc.com/news/world-europe-44546030>.
- Bensman, Todd. (2019). *Progress Report from Hungary's Fenced Borderlands*. *Center for Immigration Studies*. Diambil dari <https://cis.org/Bensman/Progress-Report-Hungarys-Fenced-Borderlands>.
- European Commission. (2021). *European Migration Network Glossary*. Diambil dari https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/irregular-migration_en.
- Global Fire Power. (2015). *GFP Power Ranking Index of Nations since 2005*. Diambil dari <https://www.globalfirepower.com/global-ranks-previous.asp>.
- Index.hu. (2015). *Felerősödött a Menekültfóbia*. Diambil dari https://index.hu/belfold/2015/10/07/felerosodott_a_menekultfobia/.
- International Viségrad Fund. (2015). *Joint Statement of the Heads of Governments of the Visegrad Group Countries*. Diambil dari <http://www.visegradgroup.eu/calendar/20150904-v4-joint>.

- Kovács, Zoltán. (2016). *Frontex Prepares for Everything but Border Protection*. Diambil dari <http://abouthungary.hu/blog/frontex-prepares-for-everything-but-border-protection/>.
- Miniszterelnok.hu. (2017). *Manchester Attack – Viktor Orbán Expresses His Condolences to the British Prime Minister*. Diambil dari <http://www.miniszterelnok.hu/manchester-attack-viktor-orban-expresses-his-condolences-to-the-british-prime-minister/>.
- _____. (2018). *Orbán Viktor's ceremonial speech on the 170th anniversary of the Hungarian Revolution of 1848*. Diambil dari <http://www.miniszterelnok.hu/orban-viktors-ceremonial-speech-on-the-170th-anniversary-of-the-hungarian-revolution-of-1848/>.
- National Directorate-General for Aliens Policing. (2019). *Information about the Hungarian Asylum Procedure at times of Mass Migration Crisis*. Diambil dari http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1128&Itemid=1717&lang=en.
- Novak, Benjamin. (2017). *Here are the "Soros Plan" National Consultation Questions!*. Budapest Beacon. Diambil dari <https://budapestbeacon.com/soros-plan-national-consultation-questions/>.
- Sarnyai, Gábor. (2018). *'Anti-Immigration' Tax Aimed at NGOs Now in Effect, Causing Confusion Among Pro-Immigration Organisations*. Hungary Today. Diambil dari <https://hungarytoday.hu/anti-immigration-tax-aimed-at-ngos-now-in-effect-causing-confusion-among-pro-immigration-organisations/>.
- The Wall Street Journal. (2016). *Why I'm Investing \$500 Million in Migrants*. GeorgeSoros.com. Diambil dari <https://www.georgesoros.com/2016/09/20/why-im-investing-500-million-in-migrants/>.
- Terbitan Pemerintah dan Organisasi Internasional**
- Cosgrave, John. (2016). *Europe's Refugees and Migrants Hidden Flows, Tightened Borders and Spiralling Costs*. Overseas Development Institute Report. London: ODI.
- European Commission. (2015a). *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A European Agenda On Migration*. Brussels: European Commission.
- _____. (2015b). *European Commission Statement Following the Vote of the European Parliament in Favour of an Emergency Relocation Mechanism for a further 120,000 Refugees*. Brussels: European Commission.
- Europol. (2017). *European Union: Terrorism Situation and Trend*

Report 2017. European Union Agency for Law Enforcement Cooperation.

_____. (2018). *European Union: Terrorism Situation and Trend Report 2018*. European Union Agency for Law Enforcement Cooperation.

Foreign and Commonwealth Office London. (2008). *Consolidated Texts of the EU Treaties as Amended by the Treaty of Lisbon*. Diambil dari https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228848/7310.pdf.

Ministry of Defence. (2012). *Hungary's National Military Strategy*. Budapest: Ministry of Defence.

National Assembly. (2007). *Act LXXX of 2007 on Asylum*. Budapest: National Assembly.

Pintér, Sándor. (2018). *Amending certain Laws relating to Measures to Combat Illegal Immigration (So-Called "Stop Soros")*. Budapest: Ministry of Interior.

Venice Commission. (2017). *Hungary Opinion on the Draft Law on the Transparency of Organisations Receiving Support from Abroad*. Strasbourg: Council of Europe.